

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Strategi Pengembangan

1. Pengertian Strategi Pengembangan

Kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *strategos* yang artinya “*a general set of maneuvers cried out over come a enemy during combat*” yaitu semacam ilmu para jenderal untuk memenangkan pertempuran.¹ Sedangkan dalam kamus Belanda-Indonesia, *strategis* berasal dari kata *majemuk*, yang artinya siasat perang, istilah strategi tersebut digunakan dalam kemiliteran sebagai usaha untuk mencapai kemenangan, sehingga dalam hal ini diperlukan taktik serta siasat yang baik dan benar. Sedangkan menurut Umar strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh para pelanggan di masa depan.² Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (*core competition*).

Strategi adalah bakal tindakan yang menuntun keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan yang banyak merealisasikannya. Di samping itu, strategi juga mempengaruhi kehidupan

¹ John M Bryson, *Perencanaan Strategis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), xvi

² Husein Umar. *Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 31.

organisasi dalam jangka panjang, paling tidak selama lima tahun. Oleh karena itu, sifat strategi adalah berorientasi ke masa depan. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional dan dalam perumusannya perlu mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dihadapi perusahaan.³

Strategi memiliki hirarki tertentu. *Pertama* adalah strategi tingkat korporat. Strategi korporat, menggambarkan arah pertumbuhan dan pengelolaan berbagai bidang usaha dalam sebuah organisasi untuk mencapai keseimbangan produk dan jasa yang dihasilkan. *Kedua* adalah strategi tingkat unit usaha (bisnis). Strategi unit usaha biasanya menekankan pada usaha peningkatan daya saing organisasi dalam satu industri atau satu segmen industri yang dimasuki organisasi yang bersangkutan. *Ketiga* strategi tingkat fungsional. Strategi pada tingkat ini menciptakan kerangka kerja bagi untuk manajemen fungsional seperti produksi dan operasi, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan penelitian dan inovasi (*research and innovation*).⁴

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu proses yang direncanakan untuk mencapai sasaran perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Saat strategi telah diterapkan maka akan diketahui apakah gagal atau berhasil pada organisasi tersebut

³ Rachmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 14

⁴ Diah Tuhfat Yoshida, *Arsitektur Strategik: Sebuah Solusi Meraih Kemenangan dalam Dunia yang Senantiasa Berubah*, (Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia, 2004), 26

Menurut Iskandar Wiryokusumo pengembangan adalah upaya pendidikan baik formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar kepribadian yang seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan bakat, keinginan serta kemampuan-kemampuannya, sebagai bekal untuk selanjutnya atas prskarsa sendiri menambah, meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesame, maupun lingkungannya ke arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan prbadi yang mandiri.⁵

Strategi pengembangan adalah usaha menyeluruh, yang memerlukan dukungan dari pimpinan atas yang dirancang untuk meningkatkan efektifitas dan kesehatan organisasi melalui penggunaan beberapa tehnik intervensi dengan menerapkan pengetahuan yang berasal dari ilmu-ilmu perilaku.⁶ Strategi pengembangan adalah suatu proses yang meningkatkan efektifitas keorganisasian dengan mengintergrasikan keinginan individu akan pertumbuhan dan perkembangan tujuan keorganisasian. secara khusus proses ini merupakan usaha mengadakan perubahan secara berencana yang meliputi suatu system total sepanjang periode tertentu, dan usaha mengadakan perubahan ini berkaitan dengan misi organisasi.⁷

⁵ Iskandar Wiryokusumo dan J. Mandilika, *Kumpulan-Kumpulan Pemikiran dalam Pendidikan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 93

⁶ Indra Wijaya, *Perilaku Organisasi*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), 244.

⁷ James L. Gibson, *Organisasi Dan Manajemen, Perilaku Struktur Dan Proses*, Terj. Djoerban Wahid (Jakarta: Erlangga, 1990), 658

Strategi pengembangan adalah usaha yang terencana dan berkelanjutan untuk menerapkan ilmu perilaku guna pengembangan system dengan menggunakan metode-metode refleksi dan analisis diri.⁸ Strategi pengembangan adalah cara atau srategi yang digunakan oleh wadah atau tempat guna proses suatu perubahan berencana yang memerlukan dukungan semua pihak, antara lain pengelola dan karyawan dengan perubahan-perubahan itu diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan suatu perusahaan, yang memerlukan usaha jangka pendek, menengah, dan panjang guna menghadapi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang.

2. Perumusan Strategi Pengembangan

Perumusan strategi sangat diperlukan setelah mengetahui sesuatu ancaman yang dihadapi perusahaan, peluang atau kesempatan yang dimiliki serta kekuatan dan kelemahan yang ada di perusahaan. Perumusan strategi meliputi menentukan misi perusahaan, menentukan tujuan-tujuan yang dicapai, pengembangan strategi, dan penetapan pedoman kebijakan.

a. Misi

Misi organisasi adalah tujuan atau alasan berdirinya suatu organisasi. Pernyataan misi organisasi yang disusun dengan baik, mengidentifikasikan tujuan mendasar dan yang membedakan antara suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, dan mengidentifikasi jangkauan

⁸ Umar Nimran, *Perilaku Organisasi*, Surabaya: Citra Media, 1997), 109

operasi perusahaan dalam produk yang ditawarkan dan pasar yang dilayani.

b. Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir aktivitas perencanaan. Tujuan merumuskan hal-hal yang akan diselesaikan, dan sebaiknya diukur jika memungkinkan. Pencapaian tujuan perusahaan merupakan hasil dari penyelesaian misi.

c. Strategi

Strategi perusahaan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara perusahaan akan mencapai misi dan tujuannya. Strategi memaksimalkan keunggulan kompetitif dan meminimalkan keterbatasan kemampuan bersaing.

d. Kebijakan

Kebijakan menyediakan pedoman luas untuk pengambilan keputusan organisasi secara keseluruhan. Kebijakan juga merupakan pedoman luas yang menghubungkan perumusan strategi dan implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut diinterpretasi dan diimplementasi melalui strategi dan tujuan divisi masing-masing. Divisi-divisi kemudian akan mengembangkan kebijakannya, yang akan menjadi pedoman bagi wilayah fungsional yang diikutinya.⁹

Pengembangan suatu perusahaan dibutuhkan strategi yang efektif. Strategi yang efektif adalah strategi yang mendorong terciptanya suatu keselarasan

⁹ Rachmat, *Manajemen Strategik...*, 30-32

yang sempurna antara organisasi dengan lingkungannya dan antara organisasi dengan pencapaiannya dari tujuan strategisnya.¹⁰ Dengan mengimplementasikan strategi yang efektif maka alternatif strategi dapat dicapai sebuah lembaga tersebut dalam mencapai tujuannya.

Sebagian besar bisnis dalam mengembangkan strategi terdapat dua tingkat yang berbeda. Kedua tingkat tersebut memberikan kombinasi yang kaya dari berbagai pilihan strategi bagi organisasi.

a. Strategi Tingkat Bisnis (*business level strategy*)

Strategi tingkat bisnis adalah serangkaian strategi alternatif yang dipilih organisasi pada saat organisasi tersebut berbisnis dalam suatu industri atau pasar tertentu. Alternatif semacam itu membantu organisasi untuk memfokuskan usaha persaingannya dalam setiap industri atau pasar tertentu.

b. Strategi Tingkat Korporasi (*corporate level strategy*)

Strategi tingkat korporasi adalah serangkaian alternatif strategi yang dipilih organisasi pada saat organisasi mengelola operasinya secara simultan di beberapa industri atau di beberapa pasar (mengembangkan suatu strategi yang sifatnya menyeluruh).

3. Pengelompokan Strategi

Strategi dapat dikelompokkan atas empat kelompok strategi, yaitu:

a. Strategi Integrasi Vertikal (*Vertical Integration Strategy*)

¹⁰ Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid I*, alih bahasa Gina Gania, Ed. Wisnu Chandra Kristiaji, (Jakarta: Erlangga, 2004), 226

Strategi ini menghendaki agar perusahaan melakukan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, dan/atau para pesaingnya, misalnya melalui merger, akuisisi atau membuat perusahaan sendiri.

b. Strategi Intensif (*Intensive Strategy*)

Strategi ini memerlukan usaha-usaha yang intensif untuk meningkatkan posisi persaingan perusahaan melalui produk yang ada.

c. Strategi Diversifikasi (*Diversification Strategy*)

Strategi ini dimaksudkan untuk menambah produk-produk baru. Strategi ini makin kurang populer, paling tidak ditinjau dari sisi tingginya tingkat kesulitan manajemen dalam mengendalikan aktivitas perusahaan yang berbeda-beda.

d. Strategi Bertahan (*Defensive Strategy*)

Strategi ini bermaksud agar perusahaan melakukan tindakan-tindakan penyelamatan agar terlepas dari kerugian yang lebih besar, yang pada ujung-ujungnya adalah kebangkrutan.¹¹

B. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

1. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna

¹¹ Nimran, *Perilaku Organisasi...*, 35

mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDES harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDES mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai – nilai kehidupan bermasyarakat.¹²

BUMDES sebagai suatu lembaga ekonomi yang modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas sendiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDES harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDES dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan (UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDES, karena implikasinya akan bersentuhan dalam penganturannya dalam peraturan daerah (Perda) maupun peraturan desa (perdes). Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai wadah bagi masyarakat dalam seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan kerja sama antar desa.

¹² Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4.

Jadi, BUMDES adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

2. Tujuan dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa

Tujuan pendirian BUMDes seperti yang dijelaskan dalam UU No.6 Tahun 2014 adalah :

- a. Meningkatkan perekonomian desa.
- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa.
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dengan pihak ketiga.
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- f. Membuka lapangan kerja.
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.¹³

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable*. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjelaskan

¹³ *Ibid.*, 12.

pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, professional dan mandiri untuk mencapai tujuan BUMDES dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat mengingat BUMDES akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam mengerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (diluar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar artinya terdapat mekanisme kelembagaan tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi dipedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUMDES. BUMDES dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Yang dimaksud kebutuhan dan potensi desa adalah :

- a. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.
- b. Adanya unit – unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDES merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Apa yang di maksud dengan usaha desa adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain :

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya.

- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan peternakan, perikanan dan agribisnis.
- d. Industri dan kerajinan rakyat.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDES harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDES penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat.

Terdapat enam prinsip dalam mengelola BUMDES yaitu :

- a. *Kooperatif*, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDES harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- b. *Partisipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDES.

¹⁴ *Ibid.*, 17.

- c. *Emansipatif*, semua komponen yang terlibat didalam BUMDES harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- d. *Transparan*, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- e. *Akuntanbel*, seluruh kegiatan usaha harus bisa di pertanggungjawabkan secara teknis maupun administrative.
- f. *Sustainable*, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDES.¹⁵

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka diharapkan proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDES diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDES. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan Padesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa.¹⁹ Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama, membangun kebersamaan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan membuka akses pasar.

Hal penting lainnya adalah BUMDES harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong

¹⁵Bumdes.id/blog/2018/01/09/prinsip-pengelolaan-bumdes/

pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri. Pengelolaan BUMDES, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDES yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya.

C. Kesejahteraan Masyarakat

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan menurut Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata sejahtera yang mempunyai makna aman, sentosa, makmur, dan selamat (terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dan sebagainya). Kata sejahtera mengandung pengertian dari bahasa Sansekerta "*catera*" yang berarti payung. Kesejahteraan material dan spiritual merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam proses pembangunan.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan tidak harus dicapai dalam aspek material saja tetapi juga dalam aspek spiritual. Ketika sebuah proses pembangunan hanya diarahkan untuk mencapai keberhasilan material maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat yang diinginkan tidak akan bisa tercapai. Masyarakat hanya akan merasakan kehidupan yang hampa dan tanpa makna meskipun semua fasilitas tersedia.

¹⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 2001), hlm. viii

Kesejahteraan oleh sebagian masyarakat selalu dikaitkan dengan konsep kualitas hidup. Konsep kualitas hidup merupakan gambaran tentang keadaan kehidupan yang baik. *World Health Organization* mengartikan kualitas hidup sebagai sebuah persepsi individu terhadap kehidupannya di masyarakat dalam konteks budaya dan sistem nilai yang ada terkait dengan tujuan, harapan standar, dan juga perhatian terhadap kehidupan. Konsep ini memberikan makna yang lebih luas karena dipengaruhi oleh kondisi fisik individu, psikologis, tingkat kemandirian, dan hubungan sosial individu dengan lingkungannya.

Dalam buku Harry Hikmat, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 pasal 1 ayat 1 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai dengan Pancasila.¹⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kesejahteraan merupakan seseorang yang mempunyai kehidupan perekonomian yang bebas dari kata kemiskinan atau bisa dikatakan seseorang yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara menyeluruh.

¹⁷ *Ibid.*, 18.

2. Kesejahteraan Ekonomi dalam Pandangan Islam

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan dari suatu masyarakat itu tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, intelektual atau akal. Al-Ghazali menitik beratkan sesuai tuntunan wahyu, kebaikan di dunia dan di akhirat merupakan tujuan utamanya. Al-Ghazali mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam kerangka sebuah individu dan sosial yang meliputi kebutuhan pokok, kesenangan dan kenyamanan serta kemewahan.¹⁸ Beberapa faktor pendorong untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sejahtera dalam konteks Islam adalah memenuhi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan atau keinginan yang merupakan tujuan dari aktivitas ekonomi Islam, dan usaha untuk pencapaian tujuan tersebut merupakan salah satu kewajiban dalam agama.

Al-Ghazali mendefinisikan bahwa aspek dalam ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yaitu kebutuhan (*dharuriyat*), kesenangan atau kenyamanan (*hajiyyat*), dan kemewahan (*tahsiniat*). Kunci pemeliharaan dari kelima tujuan dasar itu terletak pada penyediaan tingkatan pertama yaitu kebutuhan terhadap pakaian, makanan, dan perumahan. Selanjutnya, Al-Ghazali menyadari bahwa kebutuhan dasar itu cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 62.

tempat serta dapat mencakup kebutuhan sosiopsikologis. Kebutuhan yang kedua yang terdiri atas semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima pondasi tersebut namun tetap dibutuhkan guna menghilangkan rintangan dan kesulitan dalam menjalani hidup. Kebutuhan yang ketiga meliputi kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan yaitu hanya melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.¹⁹

Walaupun keselamatan merupakan tujuan akhir, Al-Ghazali tidak ingin apabila pencarian keselamatan ini sampai mengabaikan kewajiban-kewajiban duniawi seseorang.²⁰ Pada dasarnya pencarian dari kegiatan ekonomi itu bukan hal yang diinginkan saja melainkan mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Al-Ghazali juga memandang perkembangan ekonomi itu sebagai tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*). Hal inipun sudah ditetapkan oleh Allah SWT apabila tidak terpenuhi maka kehidupan di dunia ini akan menjadi runtuh. Selanjutnya, Al-Ghazali menjelaskan bahwa ada tiga alasan mengapa seseorang itu harus melakukan aktivitas ekonomi yaitu mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan

3. Indikator Kesejahteraan Ekonomi

Menurut Kolle yang dikutip oleh Rosni, kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

¹⁹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 217

²⁰ Adiwirwan A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 62

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti halnya kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya;
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti halnya kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya;
- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti halnya fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya;
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.²¹

Indikator kesejahteraan di atas menjelaskan bahwa untuk mengukur kesejahteraan dilihat dari segi materi, segi fisik, segi mental dan segi spiritual. Dengan demikian bahwa kesejahteraan bukan saja dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lainnya.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan suatu keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.²² Standar kehidupan masyarakat itu dapat dilihat melalui beberapa indikator yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS). Disisi lain kesejahteraan masyarakat itu merupakan jumlah dari berbagai pilihan yang ada dan juga kebebasan guna menentukan pilihan yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Tingkat kesejahteraan yang tinggi itu bisa dicapai

²¹ Rosni, *Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara*, Jurnal Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Vol. 9 No. 1, 2017, hlm. 57-58

²² Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: UPPSTM YKPN, 2012), hlm. 145.

dengan cara seseorang itu mempunyai perilaku yang mampu memaksimalkan tingkat kepuasan dengan sumber daya yang dimiliki. Kesejahteraan masyarakat ini dapat digambarkan dengan suatu keadaan yang tidak menempatkan suatu aspek yang lebih penting dari aspek lainnya. Sehingga kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya berhubungan dengan beberapa faktor non ekonomi saja tetapi juga pada faktor sosial dan juga politik. Konsep kesejahteraan dapat dibedakan menjadi dua diantaranya:²³

- a. Kesejahteraan individu berarti cara untuk mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan individu yang ada secara obyektif.
- b. Kesejahteraan sosial berarti cara untuk mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara obyektif yang diperoleh dengan cara seseorang harus menjumlahkan kepuasan individunya dalam masyarakat.

Dalam Islam, kesejahteraan biasa disebut dengan *falah*. *Falah* berasal dari bahasa Arab dengan kata kerja *aflaha-yufihu* yang berarti kesuksesan, kemuliaan, dan kemenangan yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup.²⁴ Dari pengertian tersebut *falah* bisa diartikan sebagai suatu kebahagiaan, kesuksesan, keberuntungan, dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat baik secara lahir maupun batin. Sehingga dalam hal ini, seseorang mampu mengukur tingkat kebahagiaan maupun kesejahteraan karena hal tersebut bersifat keyakinan yang ada dalam setiap

²³ *Ibid.*, hlm. 146.

²⁴ Pusat Kajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Perss, 2009), hlm. 2.

individu. Kesejahteraan (*falah*) dapat terwujud apabila manusia mampu memenuhi kebutuhan yang seimbang artinya manusia tersebut mampu memenuhi kebutuhan di dunia maupun di akhirat. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan tersebut akan memberikan *masalahah* bagi diri manusia itu sendiri. Hal inipun dijelaskan dalam Islam bahwa *masalahah* itu sebagai suatu keadaan material maupun non material yang bisa meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk Allah SWT yang paling mulia.

Kesejahteraan masyarakat yang didambakan dalam Al-Qur'an itu tercermin dari surga yang dihuni oleh manusia nantinya. Surga yang diharapkan manusia itu adalah surga yang diwujudkan di bumi ini dalam hal melakukan kebaikan dunia serta kelak surga yang telah dibayangkan maupun didambakan manusia itu akan dihuninya ketika di akhirat secara hakiki. Pada dasarnya masyarakat yang akan mewujudkan surga itu adalah masyarakat yang sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan surga ini dapat dilukiskan dalam peringatan Allah SWT kepada adam, seperti yang terdapat dalam Surat Thaha (20): 117-119 yaitu:

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى -
 ١١٧ - إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى - ١١٨ - وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا
 وَلَا تَضْحَى - ١١٩ -

Artinya: (117) Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. (118) Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. (119) Dan sesungguhnya kamu tidak

akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".²⁵

Dari pemamaparan ayat di atas sangat jelas bahwa sandang, pangan, papan yang di istilahkan dengan lapar, kepanasan, telanjang, dan dahaga itu semua harus dipenuhi. Terpenuhinya semua kebutuhan ini merupakan unsur pertama maupun utama bagi kesejahteraan masyarakat. Hal inipun telah dirumuskan dalam Al-Qur'an bahwa kesejahteraan masyarakat itu harus terpenuhi ketika seseorang berada di dunia maupun di akhirat. Sehingga pada kenyataanya kesejahteraan itu harus disesuaikan dengan kondisi pribadi masyarakat serta perkembangan zaman yang ada agar terhindar dari masalah penindasan, kelaparan, serta kemiskinan.

D. Dampak strategi pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Dampak adalah suatu perubahan suatu aktivitas. Aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi.²⁶ Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negative. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.

Dari penjabaran di atas maka dapat dibagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu:

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hlm. 320.

²⁶ Otto Sumarwoto. *Analisis Dampak Lingkungan*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999). hal. 38

1. Pengertian Dampak Positif

Positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. Jadi dampak positif adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik.

2. Pengertian Dampak Negatif

Negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif, pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi, dampak negative adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.²⁷

Dua jenis batasan tentang dampak yaitu :

1. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan sebelum ada pembangunan dan yang diperkirakan akan ada setelah ada pembangunan.
2. Dampak pembangunan terhadap lingkungan ialah perbedaan antara kondisi lingkungan yang diperkirakan akan ada tanpa adanya

²⁷ Ongki Satrio Sumantri, "Dampak budaya jalanan (Street Culture) terhadap Gaya Hidup Remaja Perkotaan, <http://digilib.unila.ac.id/268/10/BAB%20II.pdf>., diakses pada tanggal 30 Oktober 2019.

pembangunan dan yang diperkirakan akan ada dengan adanya pembangunan tersebut.

Kedua batasan di atas adalah sama, apabila kondisi lingkungan tempat pembangunan adalah statis, yaitu tidak berubah dengan waktu, akan tetapi lingkungan tidak statis, melainkan selalu berubah dengan waktu. Gambar 2.1 melukiskan secara skematis terjadinya dampak. Sasaran pembangunan ialah untuk menaikkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan dapat mengakibatkan dampak primer biofisik atau/ dan sosial-ekonomi-budaya. Dampak primer ini akan mempengaruhi sasaran kesejahteraan yang ingin dicapai. Dapat juga terjadi dampak primer itu menimbulkan dampak sekunder, tersier dan seterusnya, yang masing-masing dapat bersifat biofisik atau sosial-ekonomi-budaya. Dampak sekunder, tersier dan seterusnya itu juga akan mempengaruhi sasaran yang ingin dicapai.

E. Penelitian Terdahulu

1. Adawiyah (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo) telah melaksanakan pengembangan organisasi dengan sangat baik dengan

didukung adanya aspek modal sosial. Modal sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pengembangan organisasi karena memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Terutama diberbagai kegiatan yang ada di BUMDes Surya Sejahtera. Tanpa adanya modal sosial yang ditanamkan maka tidak akan terjalin hubungan yang baik antara pengurus dengan masyarakat Desa Kedungturi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2018) dilakukan BUMDes Surya Sejahtera. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

2. Yudiardi (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan perekonomian masyarakat perdesaan kabupaten Garut. Hasil penelitiannya adalah* Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif sehingga berimplikasi pada Predikat Daerah Tertinggal Strategi penguatan ekonomi desa melalui BUMDes, merupakan salah satu solusi untuk melepaskan ketergantungan masyarakat desa terhadap bantuan Pemerintah. BUMDes, merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa serta tidak lagi didirikan atas instruksi Pemerintah, tidak dikuasai oleh kelompok tertentu

serta dalam menjalankan usahanya untuk kepentingan hajat hidup orang banyak yang strategis di desa. Selain itu lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disingkat dengan BUMDes diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Yudiardi (2015) dilakukan BUMDes Kabupaten Garut. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

3. Darwita dan Redana (2018) dalam penelitiannya yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Hasil penelitiannya adalah peran perencanaan pembangunan Desa Tejakula dalam memberdayakan BUMDes Teja Kusuma, pertama bertujuan menanggulangi pengangguran, dapat berfungsi sebagai *stabilisator*, *innovator*, *modernisator*, pelopor dan pelaksana, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kedua peran BUMDes dalam pengembangan potensi masyarakat, memperkuat potensi yang dimiliki masyarakat dan

pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan pengangguran, secara umum dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Darwita dan Redana (2018) dilakukan BUMDes Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

4. Bestha Lady (2019) dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tarahan Berkarya Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan strategi pengembangan yang dilakukan oleh BUMDes Tarahan Berkarya telah berjalan dengan cukup baik dan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan BUMDes. Hal tersebut dapat dilihat pada proses identifikasi masalah, mengembangkan strategi, mengembangkan aktivitas, dan melakukan monitoring dan evaluasi. Faktor pendukung pengembangan BUMDes Tarahan Berkarya yaitu kekayaan alam yang telah tersedia dan dukungan dari lembaga internal desa. Faktor penghambat yaitu keterbatasan dana dalam pengerjaan proyek besar, kurangnya promosi wisata, partisipasi masyarakat yang kurang dalam pengembangan wisata, kurangnya perhatian dari dinas terkait, dan tidak

adanya SOP. Saran dari penelitian ini adalah diperlukan SOP tersendiri, Pemerintah Desa sebaiknya segera membentuk POKDARWIS, perlu adanya website atau sosial media untuk memudahkan proses promosi pariwisata maupun pemasaran produk kerajinan, meningkatkan kerjasama dengan perusahaan sekitar desa, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Bestha Lady (2019) dilakukan BUMDes Tarahan Berkarya Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

5. Samadi, Arrafiqur Rahman, dan Afrizal (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)”. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa terjadinya peningkatan perekonomian pada pengguna BUMDes Desa Pekan Tebih di bidang perdagangan gorengan, perdagangan pecah belah, perdagangan kelontong, pada perdagangan kelapa sawit, dan di bidang jasa. Namun pada perkebunan karet belum terjadi peningkatan perekonomiannya.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Samadi, Arrafiqur Rahman, dan Afrizal (2013) dilakukan pada BUMDesa yang berada di Desa Pekan Tebih, Kecamatan Kepenuhan Hulu, Kabupaten Rokan Hulu. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

6. Retno Yuli Yanti (2017) dengan judul “Analisis Peranan Usaha Ekonomi Desa – Simpan Pinjam (UED-SP) Bina Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang paling mendorong pelaku UMK di Desa Kualu dalam mengambil kredit dari UED-SP Bina Usaha yaitu dikarenakan suku bunga rendah. Selain itu ada perbedaan antara omset penjualan sebelum dan sesudah mendapat dana bantuan kredit pinjaman modal dari UED-SP Bina Usaha, serta adanya perbedaan keuntungan sebelum dan sesudah menerima dana bantuan kredit pinjaman modal dari UED-SP Bina Usaha.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Retno Yuli Yanti (2017) dilakukan pada BUMDesa yang berada di Desa Kualu

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

7. Jaka Sulaksana dan Irni Nuryanti (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Kasus Di Bumdes Mitra Sejahtera Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Mitra Sejahtera telah dibentuk dari tahun 2015 dan memiliki tiga bidang usaha yang dijalankannya yaitu pengelolaan tanah gunung, kios pertanian dan otomotif (grasstack). Faktor lingkungan internal BUMDes Mitra Sejahtera yang diamati yaitu manajemen, keuangan, SDM, sarana dan prasarana, serta payung hukum, sedangkan Faktor lingkungan eksternal yang diamati adalah teknologi, mitra bisnis, pemerintah, potensi desa, partisipasi masyarakat dan pesaing. Strategi yang menjadi prioritas utama untuk pengembangan BUMDes Mitra Sejahtera adalah menjadi distributor usaha atau sebagai pemasok barang untuk kios pertanian dengan nilai TAS (Total Attractive Score) tertinggi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Jaka Sulaksana dan Irni Nuryanti (2019) dilakukan pada BUMDesa Mitra Sejahtera Desa

Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka . Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

8. Robiatul Adawiyah (2018) yang berjudul Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial. Hasil penelitiannya Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo) telah melaksanakan pengembangan organisasi dengan sangat baik dengan didukung adanya aspek modal sosial. Modal sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pengembangan organisasi karena memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Terutama diberbagai kegiatan yang ada di BUMDes Surya Sejahtera. Tanpa adanya modal sosial yang ditanamkan maka tidak akan terjalin hubungan yang baik antara pengurus dengan masyarakat Desa Kedungturi.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Robiatul Adawiyah (2018) dilakukan pada Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo . Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

9. Cintia Adiend Tiara Ayu (2019) yang berjudul Strategi Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Jati dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Jatiprahu Kecamatan Karang Kabupaten Trenggalek (Perspektif Ekonomi Islam). Hasil penelitiannya (1) strategi pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa Kembang Jati yaitu, pertama menyediakan unit usaha simpan pinjam (Jasa Perkreditan Bantuan Modal Pemerintah Kabupaten Trenggalek), simpan pinjam (Jasa Perkreditan bantuan Program PK2 Provinsi Jawa Timur), dan Usaha Sektor Riil seperti, (perantara atau brokering, pasar desa, dan kakao). Kedua, sosialisasi melalui musyawarah, RT, dan yasinan rutin. Ketiga, pendekatan dan pelatihan kepada masyarakat serta pelatihan dan studi banding untuk pengurus. (2) Dampak positif (kenaikan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan jika pasar desa dan kakao beroperasi, adanya kenaikan usaha produksi bata merah dan ternak oleh peminjam modal). Dan dampak negatifnya (adanya masyarakat yang meminta penjelasan terkait pembangunan toko pasar desa). (3) Kendala yang dialami tingkat pendidikan SDM beragam sehingga pengetahuanpun berbeda, anggapan usaha BUMDes simpan pinjam saja, dan modal yang minim. Untuk itu solusinya memberi pemahaman dan sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah desa, serta meningkatkan BUMDes menjadi juara pertama BUMDes di Trenggalek.

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Cintia Adiend Tiara Ayu (2019) dilakukan pada BUMDES Desa Jatiprahu Kecamatan Karanganyar Kabupaten Trenggalek. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

10. Rismawati. (2019) yang berjudul Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian masyarakat minapolitan Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan BUMDes Perwitasari dalam meningkatkan perekonomian sudah baik dalam pelaksanaannya. Seiring perkembangannya BUMDes Perwitasari juga meningkatkan kesehatan lingkungan pada Masyarakat Desa Tambaksari. Disamping itu, pelaksanaan BUMDes Perwitasari belum dikelola secara maksimal karena ada yang perlu diperbaiki pada aspek sumber daya manusia dan finansial serta lemahnya sosialisasi dan maraknya pesaing pada kegiatan yang sama. Rekomendasi yang diberikan adalah membuat payung hukum, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan sumberdaya finansial, sosialisasi lebih merata dan memahami karakteristik pesaing sehingga pemberdayaan dan peran aktif masyarakat dapat ditingkatkan.

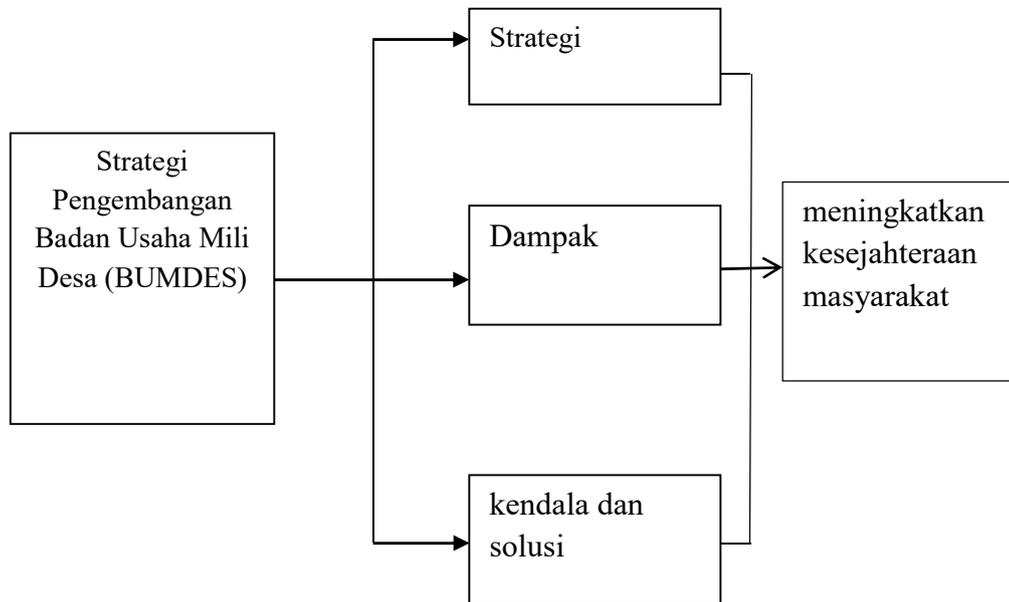
Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan objek Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Rismawati. (2019) dilakukan pada BUMDES Perwitasari Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal. Sedangkan peneliti melakukan penelitian mengenai Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

F. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.²⁸

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

Penelitian ini mendeskripsikan tentang Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar) yang mencakup: strategi pengembangan, dampak, kendala dan solusi badan usaha milik desa (bumdes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Jaten Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.